

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017-2028

Bhayu Rhama

ABSTRAK

This study aims to find out and examine the implementation of the development of tourism in the city of Palangka Raya and also to find out what the benefits of tourism development for the community.

The author uses the theories of Donald Van Metter and Carl Van Horn which are influenced by six indicators, namely the Size and Objectives of Policies, Resources, Characteristics of Implementing Agents, Attitudes / Dispositions of Implementers, Communication between Organizations and Implementing Activities, and Economic, Social and Environmental Political. This study used qualitative research methods. Data taken based on information from informants at the element level of the Head of Tourism, Attractiveness Management Section in the City Culture and Tourism Office of Palangka Raya and the Community and data obtained through the results of field research. Data announcement techniques in the form of observations and interviews.

The results showed that the Culture and Tourism Office had implemented Palangka Raya City Regulation No. 11 of 2017 concerning the Master Plan for the Development of Tourism in Palangka Raya 2017-2028 quite well. Given that this development is a long-term nature, the government prioritizes development at several points that have the highest tourism potential, but the Culture and Tourism Office still lacks Human Resources with a tourism background to improve their performance. The benefits of tourism development felt by the people of Palangka Raya city are seen from several aspects, namely economic aspects, social and cultural aspects, environmental aspects, aspects of social values and science as well as aspects of opportunities and employment opportunities.

Keywords: Implementation, public policy, tourism development.

PENDAHULUAN

Sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Tengah, Kota Palangka Raya juga memiliki berbagai macam objek wisata lainnya. Keindahan alam, keunikan flora dan fauna merupakan salah satu daya tarik wisatanya. Seni dan budaya suku dayak yang khas dan unik menambah nilai jual pariwisata Kota Palangka Raya.

Kota Palangka Raya memiliki beberapa keunikan dan kekayaan alam, budaya dan wisata buatan yang tidak kalah dengan daerah lain. Tetapi tetap tidak terlalu di kenal, bahkan untuk masyarakat yang sudah tinggal di kota ini. Disinilah diperlukan pemerintah dan masyarakat bekerja sama membangun, mengembangkan juga mempromosikan destinasi wisata yang ada di Kota Palangka Raya ini.

Untuk menangani masalah ini Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya telah menerbitkan dan mulai mensosialisasikan dua Peraturan Daerah (Perda), yakni Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palangka Raya 2017-2028 dan Peraturan Daerah nomor 10 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang bertujuan untuk mengelola dan mengembangkan potensi Kepariwisata Kota Palangka Raya guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan pada khususnya.

Di wilayah Pahandut Seberang juga ada kawasan wisata yang tidak termasuk dalam daftar wilayah Kawasan Strategis Pariwisata-3 (KSP-3) Pahandut, bisa dilihat dengan adanya gapura besar yang bertulisan “Kawasan Wisata Pahandut Seberang” disana, namun setelah memasuki wilayah tersebut sama sekali tidak ada tempat wisata yang ditemukan. Hal ini tentu saja akan mengecewakan wisatawan yang hendak atau yang sudah berkunjung ke wilayah tersebut. Berdasarkan observasi lapangan, gapura tersebut dibangun oleh masyarakat sekitar dengan tidak ada konfirmasi ke Dinas Pariwisata sebelumnya. Ini bisa jadi pembelajaran bahwa seharusnya dibutuhkan kerjasama antar masyarakat dan pemerintah untuk perkembangan kepariwisataan yang lebih baik.

TINJAUAN PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kebijakan sebagai kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya sebagai pernyataan cita cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam mencapai sasaran. Jadi bisa dikatakan bahwa kebijakan adalah usulan yang dibuat oleh seseorang, kelompok maupun organisasi dalam menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada untuk mencapai suatu tujuan yang telah di tetapkan.

Definisi lain menurut Carl Friedrich mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan hambatan atau kesulitan kesulitan serta kemungkinan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Untuk maksud dari kebijakan sebagai bagian dari kegiatan, Friedrich juga menambahkan bahwa kebijakan tersebut berhubungan dengan penyelesaian beberapa maksud atau tujuan. Meskipun maksud atau tujuan dari kegiatan pemerintah tidak selalu mudah untuk dilihat, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian penting dari definisi kebijakan. Bagaimana pun juga kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Beberapa peneliti sebelumnya juga berusaha menterjemahkan kebijakan seperti menurut Ealau dan Prewitt (1973) dalam Suharto (2015: 7), kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang membuatnya maupun yang menaatinya yang terkena kebijakan itu). Secara singkat, kebijakan dapat diartikan sebagai aturan dalam

bentuk tertulis dan keputusan resmi suatu organisasi yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik dalam lingkup publik maupun privat. Tujuan kebijakan adalah mengintegrasikan pengetahuan ke dalam suatu disiplin yang menyeluruh (overarching) untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan sehingga ia ikut berperan dalam demokratisasi masyarakat Parsons (2001) dalam Dewi (2016:15).

Definisi kebijakan akhirnya berkembang menjadi sebuah kebijakan publik yang juga dilontarkan oleh R. Dye (1992) dalam Anggara (2014:35) yang mengatakan bahwa “public Policy is whatever the government choose to do or not to do” (kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Menurut Dye, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan “tindakan” pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang sifatnya memikat orang banyak demi kepentingan dan tujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang dihadapi, atau untuk merancang suatu tatanan pembangunan publik yang lebih baik dengan semua pertimbangan yang sudah dipikirkan. Kebijakan publik akan dilaksanakan oleh para pelaku kebijakan dibawahnya setelah diputuskan oleh para pembuat kebijakan, dan menjadi tanggungjawab negara untuk mengawal proses ini sehingga dalam implementasinya jika terdapat kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat dapat diatasi sedini mungkin.

Pendapat selanjutnya dari Anderson (1984) dalam Anggara (2014:35) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya “Public Policy Making”, ialah “serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan. Konsep kebijakan ini menitik beratkan pada apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan atau dimaksud. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan di antara beberapa alternatif yang ada.

Menurut Friedrich (1963) dalam Dwiyanto (2009:18) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah, sebagai suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sementara itu menurut William N. Dunn (1994) dalam Pasolong (2016:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang bersangkutan tugas pemerintah, seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain.

Pendapat lainnya dari Van Metter dan Van Horn (1975) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam

keputusan kebijaksanaan. Dari definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan.

Van Metter dan Van Horn lebih lanjut mengajukan model implementasi yang meliputi enam indikator yaitu: (i) Ukuran dan tujuan kebijakan yang dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. (ii) Sumber daya yang dilihat dapat dilihat keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. (iii) Karakteristik agen pelaksana yang menitikberatkan pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan dilaksanakan adalah kebijakan dari atas yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana juga merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi, dan begitu pula sebaliknya. (iv) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah di tetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang di teliti (Taylor dan Bogdan,1984:5). Penelitian kualitatif yang berakar dari paradigma interpretatif pada awalnya muncul dari

ketidakpuasan atau reaksi terhadap paradigma positivist yang menjadi akar penelitian kuantitatif. Ada beberapa kritik yang dilontarkan terhadap pendekatan positivist, diantaranya adalah pendekatan kuantitatif mengambil model penelitian ilmu alam untuk penelitian sosial sehingga tidak dapat digunakan untuk memahami kehidupan sosial sepenuhnya.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *purposive sampling* kepada para pengambil kebijakan terkait obyek penelitian. Data diambil berdasarkan informasi manajemen level menengah Kepala Bidang Pariwisata, Seksi Pengelolaan Daya Tarik Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Palangka Raya dan tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui perkembangan pariwisata yang dilengkapi dengan data statistik yang diperoleh melalui hasil penelitian lapangan.

Peneliti menggunakan metode konfirmasi dan keterangan silang untuk menjaga kredibilitas data penelitian. Selain itu, metode konfirmasi juga dilakukan dengan cara mengulang jawaban peserta dengan kata-katanya sendiri dilanjutkan dengan konfirmasi kebenaran jawaban. Narasumber lainnya juga diminta untuk memberikan konfirmasi silang atas pendapat narasumber sebelumnya. Proses wawancara kemudian diakhiri dengan meminta persetujuan dari narasumber.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan faktor yang penting dalam setiap pelaksanaan kebijakan atau program. Tujuan dan sasaran kebijakan harus jelas dan tepat. Sehingga tidak adanya pro dan kontra dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dan dengan adanya kejelasan dari ukuran dan tujuan kebijakan. Tingkat keberhasilannya dapat diukur apakah kebijakan tersebut berhasil sebagaimana yang menjadi tujuannya ataukah mengalami kegagalan. Oleh sebab itu, pentingnya penentuan ukuran dan tujuan kebijakan disesuaikan dengan sosio kultur pada tingkat pelaksana kebijakan implementor dan bersifat realistis.

Tujuan dari kebijakan yang menjadi standar keberhasilan dari pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palangka Raya di akui oleh para agen pelaksana dapat dipahami dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai bisa berjalan dengan baik tugas dan fungsi mereka masing-masing jika ada suatu masalah dapat mereka selesaikan dengan baik. Sedangkan ukuran dari berhasil atau tidaknya kebijakan ini dapat diukur dari meningkat atau menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, semakin banyak jumlah kunjungan maka pemerintah berhasil dalam peningkatan pariwisata.

Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat bergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya manusia adalah salah satu bagian terpenting yang menentukan keberhasilan proses implementasi kebijakan. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas yang sesuai dengan pekejaannya. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan

sumber daya waktu juga menjadi perhitungan dalam proses implementasi kebijakan.

Sumber manusia yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata khususnya di Bidang Pariwisata masih sedikit yang pendidikannya bukan berlatar belakang pariwisata, mereka lebih banyak memahami tentang pariwisata dengan belajar langsung di lapangan. Sumber daya finansial yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya masih memiliki banyak permasalahan di bagian anggaran, dimana di kota Palangka Raya terdapat 34 tempat wisata, dalam pembangunannya tidak dapat dilakukan secara menyeluruh karena kurangnya anggaran APBD yang disediakan. Sehingga pembangunan hanya difokuskan di beberapa titik saja dilihat dari tingginya potensi wisata yang dimiliki lokasi tersebut. Disini peneliti menarik kesimpulan bahwa sumber daya yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansialnya masih sangat kurang mendukung implementasi kebijakan tersebut, sehingga proses pemangunan kepariwisataan di kota Palangka Raya belum bisa sepenuhnya dikatakan efektif.

Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik merupakan ciri ciri khusus atau sifat khas yang dimiliki pada teori Van Metter dan Van Horn, karakteristik merupakan variabel yang juga mempengaruhi dalam proses implementasi kebijakan publik. Keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari ciri- ciri atau sifat pada agen pelaksananya. Bagaimana agen pelaksana tersebut turut menunjang dalam kinerja implementasi sehingga dapat mencapai keberhasilan yang diharapkan.

Adapun karakteristik agen pelaksana sangat erat kaitannya dengan sumber daya terutama sumber daya manusianya. Dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan peranan dan tugas dari agen pelaksana belum berjalan dengan maksimal dikarenakan pengadaan jumlah agen pelaksana yang kebanyakan pendidikannya tidak berlatarbelakang kepariwisataan. Dilihat dari luasnya wilayah yang akan dibangun, dibutuhkan lebih banyak lagi sumber daya manusia yang benar-benar mengerti tentang kepariwisataan secara *detail*, itu akan sangat mempengaruhi kinerja mereka dalam membangun kepariwisataan.

Sikap/Kecenderungan/Disposition Para Pelaksana

Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan atau instansi harus merasa memiliki tanggung jawab terhadap tugasnya masing masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Van Metter dan Varn Horn (1975) ada beberapa alasan mengapa tujuan-tujuan suatu kebijakan ditolak oleh orang - orang yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan tersebut, yakni tujuan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya mungkin bertentangan dengan sistem nilai pribadi para pelaksana, kesetiaan-kesetiaan ekstra organisasi perasaan akan kepentingan diri sendiri atau karena hubungan hubungan yang ada dan yang lebih disenangi

Dalam hasil wawancara dapat diketahui bahwa arah respon para agen pelaksana di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota Palangka Raya menerima dan mendukung adanya Perda Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Palangka Raya 2017-2028. Hal ini dapat dilihat dari pemakaian perda tersebut yang menjadi landasan hukum atau legal standing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam membangun kepariwisataan di kota Palangka Raya, serta memberikan upaya peningkatan kualitas kepariwisataan sebagai wujud persetujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan adanya perda tersebut.

Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana

Menurut Van Metter dan Varn Horn (1975) prospek - prospek tentang implementasi yang efektif ditentukan oleh kejelasan ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan yang dinyatakan oleh ketepatan dan konsistensi dalam mengkomunikasikan ukuran ukuran dan tujuan tujuan tersebut. Semakin baik koordinasi diantara pihak pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsi kesalahan kesalahannya akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu juga sebaliknya

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu proses implementasi. Implementasi yang baik terjadi apabila para pembuat kebijakan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan akan apa yang akan dikerjakan dapat berjalan dengan baik apabila dalam hal komunikasi juga berjalan dengan baik. Sehingga implementasi harus dikomunikasikan dengan baik kepada pihak pihak yang terkait.sebagaimana yang diungkapkan kasubsi keamanan dan pengelolaan

Komunikasi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan kepariwisataan. Menurut Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang dikutip oleh Agustino (2012) komunikasi nantinya akan menentukan bagaimana proses koordinasi terjadi. Banyak pihak yang harus terlibat didalamnya. Komunikasi diantara dinas-dinas tersebut terjalin dengan baik dan tidak ada kendala apapun.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan eksternal yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi yang dapat berpengaruh dalam pembuatan keputusan pada kegiatan organisasi. Lingkungan eksternal dapat dikatakan memiliki pergerakan dinamis di dalamnya. Dimana pengaruh- pengaruh yang muncul tidak jarang dapat di prediksi. Oleh sebab itu, variabel ini juga menjadi variabel yang mempengaruhi dalam implementasi kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi politik yang tidak kondusif dapat menjadi kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

Kondisi ekonomi, sosial, dan politik sebagai faktor eksternal kedepannya akan mempengaruhi faktor disposisi dan karakteristik agen pelaksana. Menurut pandangan Donald Van Metter dan Carl Van Horn yang dikutip oleh Agustino (2012) kebijakan publik yang tidak memperhatikan kondisi eksternal dilingkungan kebijakan tersebut diimplementasikan dan memiliki risiko yang sangat besar karena sulit untuk direalisasikan.

Manfaat Pembangunan Kepariwisaaan bagi Masyarakat kota Palangka Raya

1. Manfaat dalam Aspek Ekonomi, perkembangan kepariwisataan dapat menstabilkan perekonomian lokal dan penganekaragaman pekerjaan. Pariwisata akan membuka lapangan pekerjaan, seperti penjaga loket, membuka tempat makan, tempat perbelanjaan dan pendirian penginapan. Hal ini juga akan menambah PAD melalui pajak, seperti pajak restoran, pajak bandara, pajak karyawan dan pajak lainnya.
2. Manfaat dalam Aspek Sosial, dapat dilihat dari perkembangan sarana dan prasarana pariwisata yang menguntungkan bagi penduduk di sekitar lokasi wisata. Pariwisata juga mendatangkan manfaat bagi lingkungan hidup, manfaat dalam bidang ilmu pengetahuan dan bidang pergaulan.
3. Manfaat dalam Aspek Budaya, membawa pemahaman dan pengertian antar budaya melalui interaksi pengunjung wisata dengan masyarakat lokal. Pariwisata juga mengenalkan budaya kita kepada masyarakat luas sehingga tidak akan cepat luntur dan hilang karena adanya sosialisasi kebudayaan.

KESIMPULAN

Implementasi Perda Nomor 11 tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kota Palangka Raya 2017-2028 dengan pembagian empat KSP (Kawasan Strategis Pariwisata) di Kota Palangka Raya sudah berjalan dengan cukup baik dengan beberapa catatan yang perlu ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari enam indikator yang diungkapkan oleh Van Metter dan Van Horn yaitu: (i) ukuran dan tujuan kebijakan yang sudah tepat sasaran, (ii) sumber daya manusia yang masih kurang dalam latar belakang pendidikannya namun tetap berlangsung dengan baik di lapangan, (iii) sumber daya finansial yang kurang masih dapat dikelola dengan baik, (iv) karakteristik agen pelaksana yang sudah mengetahui tujuan dari dibuatnya perda tersebut, (v) sikap/kecenderungan/*disposition* para pelaksana yang mendukung penuh kebijakan pemerintah terkait Perda Nomor 11 tahun 2017, (vi) komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana yang sudah sangat baik dapat dilihat dengan seringnya dinas yang bertanggungjawab dengan mengadakan diskusi dengan dinas-dinas terkait, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang sangat berpengaruh dalam hal pembangunan kepariwisataan di kota Palangka Raya. Adapun manfaat pembangunan kepariwisataan bagi masyarakat kota Palangka Raya dapat dilihat dari meningkatnya beberapa aspek seperti aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Bagyono. 2005. *Pariwisata Dan Perhotelan*. Bandung: Alfabeta.
- Burhan, Bungin (ed.). 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Donald Van Matter Dan Carl Horn Dalam Agustino (2016:133) *Model Pendekatan Dengan Proses Implementasi*

- Dunn, N William. 1999. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa. dkk)*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Indiahono. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media
- Edward Iii Dalam Dwiyanto (2009:31) *Pengertian Model Implementasi Kebijakan*
- Friedrich, Carl J. 1969. *Man and his government*. New York: McGraw-Hill.
- Gunn, Clare A. 1988. *Tourism Planning (Second Edition)*. London: Taylor & Francis.
- Hasan, Alwi. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maulana, Addin. 2014. Tinjauan Kesadaran Merek Pariwisata Indonesia “Wonderfull Indonesia”. (Online), JDP Vol. 1 No. 1 (www.kemenpar.go.id, diakses 13 April 2018).
- Mazmanian, Daniel H., & Sabatier, Paul A. 1983. *Implementation and public policy*. New York: Harper Collins.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2013. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : CV. Alfabeta
- Pendit, Nyoman S. 2006. *Ilmu Pariwisata: Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 188/MENKES/PB/I/2011 Nomor 7 Tahun 2011
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 10 Tahun 2009. *Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan*.
- Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 11 Tahun 2017. *Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kota Palangka Raya Tahun 2017-2028*.
- Rhama, B. (2013). Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pariwisata di Kalimantan Tengah. *JISPAR*, 2(2), 18-23. doi:10.17605/OSF.IO/27KV5
- Rhama, B. (2014). Hubungan Antara Nilai Yang Dimiliki Stakeholder Terhadap Pengembangan Kebijakan Ekowisata Pada Taman Nasional Di Indonesia. *JISPAR*, 3(2), 47-73. doi:10.17605/OSF.IO/3ZYNH
- Rhama, B. (2017). *The Implications of the Values and Behaviours of Actors for Ecotourism Policy: A Case Study of Sebangau National Park, Central Kalimantan, Indonesia*. University of Central Lancashire.
- Rhama, B. (2018). The Analysis of the Central Kalimantan Tourism Development Plan Based on Ecotourism Policy Perspective. *Policy & Governance Review*, 2(3), 204-016. doi:10.30589/pgr.v2i3.110
- Rhama, B. (2020). The meta-analysis of Ecotourism in National Parks. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(1), 1-17.
- Rianto Adi. 2007. *Analisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan Kawasan Perkotaan Dan Pedesaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan HAM RI.

- Siagian, Sondang P. 1990. *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Bandung: Alfabeta
- Van Meter, Donald. & Van Horn, Carl. 1975. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration and Society* 6(4): 445-488.
- Warpani, Suwardjoko P. 2007. *Pariwisata Dalam Tata Ruang Wilayah*. Bandung: Penerbit ITB.
- Widodo, Joko. 2001. *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: insan cendekia.
- Yoeti, Oka A. 2006. *Pariwisata Budaya: Masalah Dan Solusi*. Jakarta: Pradnya Paramita.